

GERAKAN PURITANISME DAN PELUANG PARIWISATA ISLAM DI KEPULAUAN SAPEKEN (Studi Pada Organisasi Persatuan Islam Di Sapeken Sumenep-Madura)

Mohammad Rifyal Adam¹, Yaqub Cikusin², Khairon³

*Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jalan MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

E-mail: adamsame950@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung gerakan Islam puritan Persis dalam mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken, (2) untuk mengetahui apa peran pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata di kepulauan Sapeken, (3) untuk mengetahui Peran masyarakat desa dalam mengembangkan wisata Islam di kepulauan Sapeken. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penghambat dan pendukung Islam puritan Persis dalam mengembangkan wisata Islam di kepulauan Sapeken adalah Persis menginginkan wisata berkonsep Islam bukan Sekuler, dibutuhkannya investor dalam mengembangkan wisata bernuansa Islam, tidak adanya dukungan pemerintah daerah; (2) masih kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata pulau Saur-Saibus, masih minimnya anggaran dan kurang lengkapnya fasilitas wisata, program visit sumenep 2020 yang tidak ada kontribusi pada pengembangan wisata di kepulauan Sapeken; (3) partisipasi masyarakat yang cukup baik namun butuh keseriusan berbagai pihak untuk mengembangkan wisata bernuansa Islam di Kepulauan Sapeken.

Kata Kunci : Islam Puritan, Wisata Islam, PERSIS, Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Agama Islam, merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya adalah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Al-quran dan Hadith (Quraish Shihab, 2013:45 dalam Fithria Khusno Amalia dkk, 2017:71). Namun dengan banyak-nya pemeluk agama Islam juga berimplikasi terhadap banyak-nya organisasi ke-agamaan yang bermunculan. Salah satunya Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung-Jabar. Adapun gerakan pembaharuan yang dibangun oleh Persis adalah gerakan pemurnian agama Islam atau yang terkenal dengan istilah puritanisme.

Menurut Nurul Fatimah (2018:72), gerakan pembaharuan Islam diawali pada abad ke-19 M, Yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi sosial ke-agamaan seperti Jamiat Khaer (1901M), Sarekat Islam (SI) (1905M), Muhammadiyah (1912M), Nahdhatul Ulama (NU) (1926M) dan Persatuan Islam (PERSIS) (1923M). Adapun orientasi-nya adalah mengembalikan umat kepada al-qur'an dan as-sunah. Dalam hal ini

Persis juga memiliki orientasi yang demikian yakni dengan Pemurnian Aqidah (*Purifikasi*).

Dalam kacamata sejarah, pencetus organisasi Persis adalah Kh. Zamzam dan Kh. Muhammad Yunus pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Persis ini mempunyai perjuangan yang gigih dalam hal melakukan gerakan pemurnian agama yakni dengan cara ‘‘*pemurnian aqidah*’ dari kelakuan syirik, takhayul, khurafat, bid'ah dan munkarat. Dalam langkah-langkah Persis untuk memurnikan umat Islam tidaklah mudah karena, persoalan ini begitu sensitif dalam masyarakat yang nantinya dapat menyebabkan reaksi yang cukup keras bahkan organisasi Puritan ini tidak jarang dianggap sebagai agama baru yang dapat merusak persatuan umat Islam (Nurul Fatimah, 2018:72).

Runusan Masalah

Berdasarkan gambaran diatas dengan permasalahan yang terjadi di kepulauan sapeken pada sektor pariwisata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Gerakan Islam Puritan PERSIS dalam

- mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan wisata di Kepulauan Sapeken?
 3. Bagaimana Peran Masyarakat Desa Terhadap pengembangan wisata Islam di Kepulauan Sapeken

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas maka tujuan yang akan di raih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa faktor Penghambat dan Pendukung Gerakan Islam Puritan PERSIS dalam mengembangkan wisata di Kepulauan Sapeken?
2. Mengetahui bagaimana Argumen atau Pendapat Ormas Islam Sapeken yakni PERSIS, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Masyarakat Kepulauan Sapeken melihat Peran Pemerintah Daerah/Kabupaten Sumenep terhadap pengembangan wisata di Kepulauan Sapeken?
3. Mengetahui bagaimana Peran Masyarakat Desa dalam mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan Sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan Ilmu administrasi Publik dan Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan "Gerakan Puritanisme dan Peluang Pariwisata Islam di Kepulauan Sapeken (Studi Pada Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) di Sapeken Sumenep-Madura 1972-2020)"
2. Manfaat Praktis Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang "Gerakan Puritanisme dan Peluang Pariwisata Islam di Kepulauan Sapeken (Studi Pada Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) di Sapeken Sumenep-Madura 1972-2020)."

Kajian Teori

Teori Pembangunan

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan

yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi, bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang dihipokan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. (Budiman, 1995: 1 -2 dalam Rauf A. Hatu, 2013:5).

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996: 7 dalam Rauf A. Hatu, 2013:6).

Konsep pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut pertama, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Daur proses itupun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik lain, lalu dimulai lagi dari titik awal dimana sebelumnya telah dimulai 6 Kedua, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada pertambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. Ketiga, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan.

Menurut Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000 dalam Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, 2009:222-223).

Teori Problem Pembangunan

Musuh utama yang dihadapi oleh pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, rendahnya kesehatan yang semuanya bermuara pada kemiskinan. Semua negara pernah atau

bahkan sedang berjuang menghadapi sekian banyak problem tersebut, disamping masih banyak lagi problem turunan lagi yang bergelayut pada tiap kawasan negara tertentu. *"What does poverty happen"*, adalah pertanyaan yang paling mendasar ketika membicarakan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah dari pembangunan. (Rauf A.Hatu, 2013:8).

Teori Rostow: Tahapan Proses Pembangunan

Teori Rostow tentang tahapan proses pembangunan dalam masyarakat ini dipaparkan dalam bukunya yang berjudul *"The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto,"* yang terbit pada tahun 1960. Rostow berpendapat bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak secara linier, dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat maju dan modern (Rauf A. Hatu, 2013:16). Menurut Rostow dalam Rauf A. Hatu (2013:16-17), proses pembangunan terjadi melalui lima tahapan, secara ringkas dikemukakan sebagai berikut:

1. Masyarakat Tradisional

Ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Dengan demikian, penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan juga sangat terbatas, sehingga pemikirannya lebih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar kekuasaan manusia. Akibatnya, produktivitas sangat terbatas. Masyarakat bersifat statis sehingga perubahan sosial berjalan sangat lambat. Produksi cenderung habis untuk konsumsi, persediaan modal terbatas sehingga sedikit atau hampir tak ada investasi.

2. Prakondisi Lepas Landas

Perubahan mulai terjadi dengan adanya pengaruh eksternal, misalnya ikut campur tangannya masyarakat yang lebih maju. Ide-ide pembaharuan mulai masuk masyarakat mulai berkembang dan bergerak menuju tahap prakondisi untuk lepas landas. Syarat-syarat yang diperlukan untuk proses industrialisasi mulai tampak.

Kegiatan meningkatkan tabungan mulai terjadi yang selanjutnya dapat dipakai untuk investasi pada sektor-sektor produktif, termasuk investasi untuk pendidikan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas berkembang secara signifikan. Kondisi sosial-politik semakin stabil dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat yang kuat.

3. Lepas landas

Periode ini ditandai dengan berkurangnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi meningkat, demikian

juga sektor industri mulai berkembang pesat. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh diinvestasikan untuk industri dan pabrik-pabrik baru.

Di pihak lain, terjadi perkembangan teknologi pertanian. usaha pertanian bukan sekedar untuk tujuan konsumtif, tetapi juga bermotif komersil untuk memperoleh keuntungan. Pengembangan sektor pertanian mutlak dilakukan pada periode lepas landas karena sangat diperlukan untuk mendukung sektor industri dan proses modernisasi.

4. Bergerak menuju kedewasaan

Penerapan teknologi modern terjadi di seluruh sektor perekonomian. Periode ini ditandai dengan proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, kendatipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Sebagian kecil pendapatan nasional diinvestasikan kembali untuk mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Sektor industri dan jasa berkembang pesat. Negara memantapkan posisinya dalam perekonomian global.

5. Era Konsumsi massa yang tinggi

Pendapatan masyarakat terus meningkat. Konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, melainkan sudah meningkat kekebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

Pada tahap terakhir ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan paling utama. Surplus ekonomi cenderung dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pasca periode ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan mampu menopang kemajuan secara berkelanjutan.

Teori Max Weber: Etika Protestan

Kepercayaan atau etika protestan menyatakan bahwa hal yang menentukan apakah mereka masuk surga atau masuk neraka adalah keberhasilan kerjanya selama di dunia. Apabila dia melakukan karya yang bermanfaat luas maka dapat dipastikan bahwa dia akan mendapatkan surga setelah mati. Semangat inilah yang membuat orang protestan melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan serta-merta menghasilkan surga dan agregat semangat individual inilah yang memunculkan kapitalisme di Eropa dan Amerika (Rauf A.Hatu, 2013:22)

Selanjutnya, istilah Etika Protestan ini menginspirasi Robert Bellah yang menulis tentang agama Tokugawa yang ada di Jepang dan

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang, hal itu bisa dilihat bagaimana tingginya pertumbuhan ekonomi di Jepang. (Rauf A. Hatu, 2013:22)

Teori Inkeles-Smith: Penopang Pembangunan

Inkeles dan Smith juga mengkaji tentang pentingnya faktor manusia sebagai faktor penting dalam penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar masalah pemasokan modal dan teknologi saja. Aspek manusia penting sekali sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama proses pembangunan yang berlangsung. Maka Inkeles dan Smith kemudian memberikan ciri-ciri manusia modern, antarlain: keterbukaan terhadap terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada kehidupan masa sekarang dan kehidupan masa depan, memiliki kesanggupan dalam merencanakan,serta memiliki kepercayaan bahwa manusia bisa menguasai alam (Rauf A.Hatu, 2013:24).

Berdasarkan kajiannya, Smith-Inkeles menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan dipandang tiga kali lebih efektif dibanding pendekatan yang lain. Jika melihat kondisi Indonesia, salah satu yang krusial untuk dkembangkan adalah pendidikan, jika negara ingin modern dan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka perhatian terhadap pendidikan harus besar (Rauf A.Hatu, 2013: 24).

Teori PembangunanBerkelanjutan

Gagasan pembangunan berkelanjutan dimulai ketika Brundtland Comission merumuskan dan mendefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah "Memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Pembangunan sebagai sebuah gagasan, prinsip, dan konsep berkaitan dengan bagaimana hal ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Praktik-praktik pembangunan berkelanjutan terkait juga relasinya dengan pemerintah (Mohammad Mulyadi dkk, 2015:5).

Aspek penting dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak

hanya diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang lahir dari minoritas kecil teknokrat atau pembuat kebijakan, namun menekankan peran penting masyarakat dan kaum minoritas di dalamnya. Dengan demikian, bagian penting yang menjadi penekanan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menyertakan beragam pemangku kepentingan dalam penentuan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya (Mohammad Mulyadi dkk, 2015:7)

Teori Pembangunan Partisipatif

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan pri- oritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Teori Infrastruktur

Menurut Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen- agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial (Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, 2009:225)

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam

Kodoatie, 2003 dalam Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, 2009:225)

The World Bank (1994 dalam Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, 2009:225), membagi infrastruktur menjadi tiga yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Teori Anggaran

Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Basri, 2013 dalam Nur Alim Bahri, 2017:24). Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas (Pangkey, 2015 dalam Nur Alim Bahri, 2017: 24).

Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran. Anggaran juga harus disusun menggunakan suatu urutan tertentu, bukan acak-acakan.

Penyusunan anggaran yang baik adalah untuk mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai oleh perusahaan dan untuk melihat hubungan antara satu bagian rencana kerja dengan bagian lain (Tika Sari, 2013 dalam Chelsea Pangalila dkk, 2017: 662)

Konsep dan Pengembangan Destinasi Wisata

1. Konsep wisata

Istilah kepariwisataan sebenarnya merupakan gabungan atau cakupan dari beberapa istilah sebelumnya yakni istilah wisata, pariwisata dan kepariwisataan. Kepariwisataan ini berarti keseluruhan kegiatan wisata yang dilakukan oleh

wisatawan dengan dilengkapi oleh fasilitas dan infrastruktur pendukung yang disediakan oleh para stakeholders pariwisata. Namun unsur yang paling utama dalam suatu pengembangan kepariwisataan adalah unsur daya tarik wisata.

Obyek daya tarik wisata (ODTW) dijelaskan oleh Hadiwijoyo (2012:49) dalam Khusnul Khotimah dan Luchman Hakim (2017:58) sebagai suatu bentukan dan fasilitas yang saling berhubungan dan menjadi alasan/sebab wisatawan mengunjungi suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: obyek wisata alam atau lingkungan (ekowisata), obyek wisata sosial budaya dan obyek wisata minat khusus (Khusnul Khotimah Wilopo dan Luchman Hakim, 2017:58)

2. Pengembangan Destinasi wisata

Menurut UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013: 159) dalam Khusnul Khotimah Wilopo dan Luchman Hakim (2017:58) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial
- b. Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
- c. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
- d. Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
- e. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan

permasalahan yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada kondisi yang kekinian berdasarkan fakta – fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Metode deskriptif bertujuan untuk mengungkap fakta yang terjadi saat proses penelitian berjalan dan menyuguhkan data dengan apa adanya. Selain itu, metode deskriptif harus searah dengan rumusan masalah karena tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah.

Sementara Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2009) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, fenomena yang terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan Moleong sendiri mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh.

Menurut Moleong (2011:152), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif- eksklusif fakta masuk – keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang sudah diambil, dengan fokus sebagai berikut:

1. Memfokuskan Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Gerakan Islam Puritan PERSIS dalam mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken
 - a. PERSIS Sapeken menolak pembangunan wisata sekuler
 - b. Butuh Investor dalam mengembangkan wisata di Kepulauan Sapeken
 - c. Pemerintah Daerah tidak sepakat pengembangan konsep wisata Islam di Kepulauan Sapeken
2. Memfokuskan terhadap Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan wisata di Kepulauan Sapeken
 - a. Kurang-Nya keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan wisata Saur-Saibus di Kepulauan Sapeken
 - b. Kurang-Nya Anggaran dan Fasilitas wisata di Kepulauan Sapeken

- c. Program visit Sumenep 2020 tidak memberikan Kontribusi dalam memajukan sektor kepariwisataan di kepulauan Sapeken

3. Memfokuskan terhadap bagaimana Peran Masyarakat Desa dalam mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken?
 - a. Partisipasi warga Desa di Kepulauan Sapeken dalam mengembangkan wisata Islam.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kepulauan Sapeken Sumenep-Madura Jatim.

Sedangkan situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam bab terdahulu, maka situs dari penelitian ini adalah Pada Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) di Sapeken.

3.4 Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi lapangan yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana.

1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang akan diberikan oleh pewawancara.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya. Dimana data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan, hingga laporan dari organisasi persatuan Islam (PERSIS) di Sapeken dan Ormas Islam di Sapeken (Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) Sapeken.

3.5 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh data-data di lapangan. Untuk itu, teknik atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan juga akurat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data

yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan, namun pewawancara tetap memiliki pedoman secara garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yang akan dilakukan penulis selama proses wawancara terhadap narasumber di kepulauan Sapeken yaitu:

1. Kh. ad-Dailamy Abu Hurairah (Informan Utama)
2. H. Mabni Darsi, MA (Informan Utama)
3. H. Jaelani S.pd, M.pd (Informan Pelengkap)
4. Sudirman Fauzi (Informan Pelengkap) :
5. Syurkati, BA (Informan Pelengkap) :
6. Ustadz Sa'in (Informan Pelengkap) :
7. H. Nuhun S.sos (Informan Pelengkap) :
8. Saudara Arman dan Agus dan Ibu Firmana dan Ibu Putri (Informan Pelengkap)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Gerakan Islam Puritan dalam mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken

Kepulauan sapeken di sejumlah pulau/desa mempunyai panorama pantai-pantai dan terumbu karang yang masih terjaga ke-asrian-Nya dan mempunyai beraneka suku seperti Bugis, Bajo, Mandar dan Lain sebagainya yang menjadi modal untuk mengembangkan destinasi wisata baik lokal /wisata mancanegara/dunia. Maka dari itu gerakan puritan Persis menginginkan pengembangan wisata yang bernuansa Islami. Karena melihat kondisi budaya masyarakat yang kental terhadap ajaran Islam (Al-qur'an dan As-Sunnah).

Apalagi latar belakang Persis merupakan pencetus gerakan Islam puritan yang menginginkan umat untuk berpedoman kepada al-qur'an dan As-sunnah dalam menelusuri kehidupan. Langkah awal Persis Sapeken untuk mengembangkan wisata Islam adalah dengan bekerja-sama dengan pengusaha/investor Bapak Zainal Saniya pada tahun 2009.

Namun terhambat karena kurang-Nya dukungan Pemerintah Daerah (Sumenep) dan investor tidak berkelanjutan (Tidak jadi berinvestasi) dalam mengembangkan wisata di kepulauan Sapeken.

Adapun harapan Persis Sapeken dalam mengembangkan wisata di K.Sapeken adalah dengan adanya wisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam mengembangkan wisata di K.sapeken Persis menolak jika pembangunan memakai konsep yang sekuler harus yang Islami. Hal ini sesuai dengan yang diinginkan Kh.ad-Dailamy

Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan wisata di Kepulauan Sapeken

Pemerintah Daerah akan terus kembangkan Potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim), baik yang ada di daratan maupun kepulauan. Bahkan pada tahun 2017 ini, ada dua pulau di Kecamatan Sapeken yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, yakni Pulau Saur-Saebus (<https://newssatu.com>). Dari pemberitaan bahwa pemerintah akan mengembangkan wisata di Pulau Saur-Saibus. Namun sampai sekarang belum ada keberlanjutan pengembangan wisata di Pulau Saur-Saibus.

Fasilitas wisata merupakan segala sarana dan prasarana yang memperlancar kemudahan dalam melaksanakan kegiatan rekreasi maupun pengelolaannya yang dilakukan oleh wisatawan, pengelola maupun masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Tokoh Persis Sapeken.

Menurut H. Mabni Darsi, M.A selaku Tokoh Persis dan Pengurus Partai PKS Sapeken dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang lengkap merupakan salah satu sarana-dan prasarana yang membuat wisatawan nyaman agar mudah melaksanakan kegiatan rekreasi di tempat wisata”

Menurut pengamatan penulis selama proses penelitian, bahwa masyarakat di kepulauan Sapeken mempunyai harapan agar pengembangan wisata di urus dengan serius oleh Pemerintah Daerah. Jangan hanya sekedar kata-kata belaka agar masyarakat tidak kecewa dengan janji-janji dari pemerintah. Adapun harapannya bahwa dikembangkan atau dibangun fasilitas penunjang wisata agar masyarakat/wisatawan yang berkunjung merasa mudah dan nyaman berwisata di pulau Saur-Saibus kepulauan Sapeken.

Bagaimana Peran masyarakat Desa dalam mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken

Menurut Saudara Arman selaku warga Desa dalam wawancara dengan penulis, mengatakan bahwa:

“Tidak akan ada daya tarik wisata bagi Turis jika memakai aturan Islami Mas.

Yah maunya yah wisata biasa aja yang terpenting adanya fasilitas yang lengkap yang bisa bikin nyaman wisata Mas.”

Adapun menurut Ibu Firmana selaku warga Desa dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa:

“Harus ada pemisahan mas, kalau mau dibuat wisata dengan konsep Islami. Seperti di pisahnya wisatawan Muslim dan non Muslim Mas.”

Pemisahan antara pengunjung Islam dan Non-Islam maksudnya adalah

Adanya penempatan pengunjung dalam satu pulau namun dipisahkan dari warga Islam. takunya terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun menurut Bapak Agus selaku warga dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa:

“Sembarang aja Mas, mau konsep Islam atau bukan yang penting ada lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Mas.”

Keinginan masyarakat terhadap pariwisata menginginkan adanya perubahan dari peningkatan ekonomi namun harus ada bentuk keseriusan semua Pihak yang berwenang.

Menurut Ibu Perti selaku warga dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa:

“Perlu adanya keseriusan pemerintah daerah dan ikut melibatkan Persis dalam pembangunan wisata. Yah bagusya berkonsep Islam mas, karena kebanyakan masyarakat kita ber-agama Islam Mas.”

Menurut pengamatan penulis bahwa masyarakat sepakat dengan pembangunan/pengembangan wisata namun tidak yakin akan berhasil jika memakai konsep/aturan Islam pada wisata di kepulauan Sapeken. Butuh keseriusan semua pihak untuk mengembangkan wisata bernuansa Islam. Dan jika dipaksa tetap melaksanakan konsep Islam harus ada pemisah antara wisatawan Muslim dan Non-Muslim.

Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait gerakan puritanisme dan Peluang Pariwisata Islam di Kepulauan Sapeken dengan studi pada organisasi Persatuan Islam di Sapeken Sumenep-Madura 1972-2020. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana Gerakan Islam Puritan di kepulauan sapeken dalam mengembangkan wisata bernuansa Islam. Pada tahun 2009 organisasi Persatuan Islam bekerja sama dengan pengusaha asal Pulau Bali untuk mengembangkan wisata bernuansa Islam di Pulau Sitabok mengingat kepulauan sapeken juga mempunyai suku Bajo.

Namun perkembangan pariwisata bernuansa Islam tidak jadi digarab di kepulauan sapeken sampai sekarang karena beberapa hambatan seperti; *pertama*, tidak adanya dukungan dari pemerintah Daerah, ke-dua Tidak adanya anggaran dalam melanjutkan pembangunan wisata di Pulau Sitabok-Kepulauan sapeken. Dampak dari tidak adanya dukungan dari pemerintah dan minimnya anggaran menyebabkan fasilitas wisata tidak membuat nyaman para pengunjung.

Disamping itu, hal lain yang menjadi faktor penghambat Persis Sapeken dalam mengembangkan wisata bernuansa Islam karena kurang mendapat perhatian dari masyarakat desa di kepulauan sapeken. Adapun Tokoh Muhammadiyah menyimpulkan hal yang serupa bahwa Pemerintah kurang serius dalam menanggapi permasalahan yang ada di kepulauan Sapeken pada sektor wisata. Kepulauan sapeken bisa saja maju dari segi ekonomi melalui wisata namun harus ada partisipasi baik datangnya dari pemerintah, Ormas, Pengusaha ataupun Masyarakat desa sendiri.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Karya
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Hatu, Rauf. 2013. Sosiologi Pembangunan. Malang: Interpena
- Mulyadi, Mohammad dkk, Sali Susiana ed. 2015. Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Yogyakarta: Azza Grafika.

Sumber Tesis

- Nurul Fatimah. 2017. Gerakan Puritanisme Di Kepulauan Kangean (Persatuan Islam (Persis) di Sapeken Sumenep-Madura 1972-2016). Pascasarjana *Interdisciplinary Islamic Studies*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Chelsea Pangalila, Inggriani Elim, Stanley Kho Walandouw. 2017. Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 12 No.2
- Fithria Khusno Amalia, Muhtar Solihin, Badruzzaman M. Yunus. 2017. Nilai-Nilai Ulul Al- ‘Azmi Dalam *Tafsir Ibn Kathi*. Fakultas Ushuluddin. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 2 No.1

- Fredy Kurniawan, dkk. (2018). Pemetaan Potensi Wisata Halal di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Universitas Wiraraja Sumenep. Vol.2. No.6
- Nurul Fatimah. 2018. Gerakan Puritanisme Persatuan Islam di Kepulauan Sapeken Sumenep-Madura, 1972-2016. Vol.2 No.1
- Nur Halim Bahri. 2017. Studi Kritis: Realisasi Anggaran Sektor Publik Ditinjau Dari stewardship Theory Dalam Aplikatif Kartu Indonesia Sehat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lailatus Sakinah Rahayu. 2019. Sosial Budaya Suku Bajo di Pulau Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2018. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jember.
- Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus. 2009. Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Vol. 2 No. 2
- Syaiful Bahri. 2015. Peran Kh. Ad-Dailami Abu Hurairah Di Sapeken Sumenep Madura 1973-2000M. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zaifuddin. 2017. Wisata Gili Iyang: Studi Pemetaan Potensi Ekonomi dan Pengetahuan Masyarakat. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber Internet

- Batubara, Ariyandi. 2017. Puritanisme. Diambil tanggal 3 September 2020, dari <https://kajianpemikiranislam.com/puritanisme>
- Muttaqien, M Khaerul. 2020. Peran Ormas Islam Bagi Indonesia (Pidato Prof. Dr. Din Syamsuddin pada Konferensi Pembaruan Pemikiran Islam Al-Azhar. Kairo, 27-29/1-2020). Diambil tanggal 9 September 2020. dari <https://gontornews.com/peran-ormas-islam-bagi-indonesia>
- Agung Sasongko. 2015. Persis: Jihad Ekonomi tak Bisa Ditunda. diambil tanggal 20 November 2020 dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/07/nr3xsm-persis-jihad-ekonomi-tak-bisa-ditunda-lagi>
- Rakhmat Hidayat. 2020. Percepatan Pengembangan Wisata, Sumenep Perlu Investor. Diambil tanggal 1 Desember 2020. Dari

<https://memorandum.co.id/percepatan-pengembangan-wisata-sumenep-perlu-investor/>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

